

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Provinsi Bali dikenal akan kekayaan tradisi dan budayanya yang dijalankan melalui sistem desa pakraman. Desa adat ini memiliki kewenangan otonom dalam mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk bidang sosial dan ekonomi. Salah satu wujud kemandirian tersebut terlihat dalam pendirian unit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah oleh warga komunitas desa adat, yang juga mencakup pengelolaan kekayaan milik desa. Sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan UMKM, Pemerintah Provinsi Bali mendirikan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), yaitu institusi keuangan yang beroperasi di wilayah pedesaan untuk mendukung perekonomian masyarakat lokal. Pemerintah Provinsi Bali mendirikan LPD sebagai wadah untuk menunjang pembangunan di desa adat atau desa pakraman (Suarmanayasa & Ariasih, 2024). Temuan itu juga selaras dengan studi dari (Brata & Yudiantara, 2024) yang menjelaskan LPD juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa adat di Bali. Selain itu, LPD berfungsi sebagai institusi yang mengumpulkan sumber daya finansial dari warga. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh LPD hampir sama dengan lembaga keuangan lainnya (Kumalasari & Ernawatiningsih, 2020). Dana tersebut berupa tabungan dan deposito yang kemudian disalurkan melalui kredit untuk menghasilkan keuntungan (Wangsa & Yuliarmi, 2024; Pramiswari et al., 2022). Desa adat ialah salah satu komunitas sosial kultural yang berkembang di wilayah Bali dan mempunyai sejumlah hak untuk mengatur komunitasnya sendiri,

termasuk otonomi di bidang sosial ekonomi, yakni kewenangan untuk mengatur hubungan antarkelompok masyarakat serta mengatur aset yang dimiliki oleh desa adat (Sasdika & Purnamawati, 2022). Setiap desa pakraman memiliki sejumlah hak, salah satunya adalah hak otonomi. Otonomi ini mencakup bidang sosial dan ekonomi, yang dimana desa adat mempunyai wewenang dalam menjalankan hubungan antarwarga serta mengelola aset atau kekayaan milik desa secara mandiri.

Lembaga Perkreditan Desa memiliki regulasi sendiri yang tertuang pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 3 Tahun 2017, yang mendefinisikan LPD sebagai lembaga keuangan milik desa yang berlokasi di wilayah administratif Desa Pakraman. Sementara itu, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2012, tujuan dibentuknya LPD ialah sebagai institusi desa yang berperan sebagai tempat pengelolaan aset desa, baik dalam bentuk dana tunai maupun instrumen keuangan lainnya yang bernilai. (Kumalasari & Ernawatiningsih, 2020). Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai lembaga keuangan milik desa memiliki karakteristik yang berbeda dari lembaga keuangan yang lain (Asriani, dkk., 2019). Dalam hal ini, LPD yang beroperasi di setiap desa adat merupakan entitas keuangan yang sepenuhnya dimiliki oleh masyarakat desa adat (Suparsa, dkk., 2024). Keberadaan LPD memiliki signifikansi strategis yang perlu terus ditingkatkan, mengingat kontribusinya yang substansial dalam mendukung kesejahteraan ekonomi dan kemandirian finansial masyarakat adat. Aktivitas operasional LPD meliputi pengumpulan modal dari anggota krama desa melalui instrumen simpanan dan deposito, yang kemudian didistribusikan kembali dalam bentuk fasilitas kredit. Singkatnya, tujuan utama LPD ialah menghasilkan keuntungan finansial (Dinayanti & Adiputra, 2022). Semua perusahaan

mempunyai visi yang utama yaitu untuk memaksimalkan laba dari setiap kegiatan operasional perusahaan yang ditunjukkan dalam laporan finansial pelaku usaha (Atthariq & Suhayati, 2022). Namun, seluruh pelaku usaha spesifik pada LPD dihadapkan pada berbagai bentuk risiko yang menuntut pengelolaan secara cermat dalam meningkatkan keuntungan (Ester et al., 2022). Lembaga Perkreditan Desa berfungsi sebagai tempat pengelolaan aset milik komunitas desa yang mengoperasikan kegiatan ekonomi dengan tujuan strategis untuk memajukan taraf kesejahteraan sosial masyarakat serta berkontribusi terhadap pembangunan pada level desa. Ketidaksamaan pertumbuhan laba pada LPD disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah margin pendapatan bersih, penilaian modal, dan likuiditas.

Belakangan ini, lembaga keuangan berbasis kearifan lokal, seperti LPD, menghadapi tantangan besar dalam menjaga stabilitas keuangan, terutama di tengah dinamika ekonomi global dan regional yang semakin kompleks (Hung & Viriany, 2023). Penelitian ini memilih LPD Kabupaten Badung sebagai objek penelitian karena lembaga tersebut memiliki total aset tertinggi di Bali. Selain itu berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (BPS) tahun 2023 pendapatan per kapita Kabupaten Badung berada di posisi teratas apabila disandingkan dengan Kabupaten atau Kota lainnya di Bali. Meskipun demikian, pengawasan terhadap LPD di Bali masih belum memadai, sehingga beberapa LPD mengalami masalah likuiditas yang berdampak negatif terhadap pertumbuhan laba. Kondisi ini menandakan perlunya peningkatan pengelolaan dan pengawasan LPD agar dapat menjaga kelangsungan operasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan (Alfiandi & Supadmi, 2025). Selain itu, pandemi Covid-19 berdampak pada efektivitas dan efisiensi

pengelolaan keuangan LPD di Kabupaten Badung (Diatmika & Putra, 2021). Dalam beberapa tahun terakhir, LPD tidak hanya harus menghadapi dampak dari pandemi Covid-19 yang memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat, tetapi juga tantangan dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat sebagai nasabah utama (Indrasari et al., 2022; Amalia & Setijaningsih, 2025). Dengan demikian, analisis pertumbuhan laba menjadi indikator penting untuk menilai kinerja LPD, sekaligus memberikan gambaran tentang kemampuan lembaga ini dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi dan manajemen. Fluktuasi pertumbuhan laba selama periode tertentu dapat mencerminkan kondisi keuangan LPD dan efektivitas strategi yang diterapkan untuk memastikan keberlanjutan lembaga di masa depan. Adapun grafik pertumbuhan laba yang dapat ditunjukkan pada Gambar 1.1.



Sumber: Laporan Keuangan LPD, 2019-2024

Gambar 1.1 Pertumbuhan Laba

Grafik tersebut menggambarkan fluktuasi pertumbuhan laba LPD di Kabupaten Badung selama periode 2019 hingga 2024 yang berjumlah 109 LPD dari 122 LPD karena beberapa LPD di tiap tahun tidak mempublikasikan laporannya. Pada tahun

2019, pertumbuhan laba menunjukkan angka positif sebesar 0,11%, mencerminkan kondisi awal yang stabil. Namun, pada tahun 2020, terjadi penurunan menjadi -0,33%, yang mengindikasikan awal dari tekanan ekonomi yang lebih besar. Penurunan ini semakin tajam pada tahun 2021, di mana pertumbuhan laba mencapai titik terendah sebesar -5,88%. Kondisi ini bisa terjadi dikarenakan efek dari Covid-19, yang memengaruhi stabilitas ekonomi lokal dengan signifikan. Pada tahun 2022, terlihat adanya perbaikan dengan pertumbuhan laba yang kembali positif sebesar 0,12%, meskipun masih dalam skala kecil. Pemulihan ini berlanjut secara signifikan pada tahun 2023, di mana pertumbuhan laba meningkat tajam hingga mencapai 12,13%, sedangkan pada tahun 2024 kembali menurun 0,11%. Perubahan drastis dari tren negatif menjadi positif ini menunjukkan keberhasilan strategi pemulihan yang diterapkan oleh LPD serta adanya perbaikan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Fluktuasi ini mencerminkan dinamika kinerja LPD dalam menghadapi tantangan eksternal dan internal, serta efektivitas langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi krisis dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Penelitian ini tertarik diteliti lebih lanjut karena pada gambar grafik 1.1 menunjukkan pada tahun 2024 mengalami penurunan seperti di tahun 2022, yang mana pada tahun ini kasus Covid-19 sudah selesai di Bali khususnya di Kabupaten Badung. Selain itu total selisih rata-rata laba tahun berjalan juga mengalami penurunan yang pada tahun 2023 sebesar 30.004.105 menjadi 14.795.592 di tahun 2024. Data tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Peningkatan atau Penurunan Rata-Rata Total Laba Tahun Berjalan

Tahun	Rata-Rata Total Laba Tahun Berjalan	Peningkatan atau Penurunan
2018	136.732.125	
2019	146.472.161	9.740.036
2020	71.391.153	-75.081.008
2021	47.375.272	-24.015.881
2022	71.135.603	23.760.331
2023	101.139.708	30.004.105
2024	115.935.300	14.795.592

Sumber: Laporan Keuangan LPD, 2018-2024

Berdasarkan Tabel 1.1 Peningkatan atau Penurunan Rata-Rata Total Laba Tahun Berjalan dapat menunjukkan Rata-rata total laba tahun berjalan LPD Kabupaten Badung mengalami dinamika yang cukup signifikan dari tahun 2018 hingga 2024. Pada tahun 2019, terjadi peningkatan laba sebesar Rp9.740.036 dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, pada tahun 2020, laba mengalami penurunan signifikan sebesar Rp75.081.008, yang kemungkinan besar dikarenakan efek dari pandemi Covid-19 pada ekonomi Indonesia. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2021 dengan berkurangnya laba sebesar Rp24.015.881, menunjukkan bahwa kondisi keuangan LPD masih terpengaruh oleh ketidakstabilan ekonomi. Pada tahun 2022, kondisi keuangan menunjukkan peningkatan laba sebesar Rp23.760.331, yang mengindikasikan adanya perbaikan ekonomi. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2023, di mana laba meningkat cukup signifikan sebesar Rp30.004.105. Tahun 2024 mencatat penurunan laba sebesar Rp14.795.592, meskipun secara keseluruhan tren keuangan masih menunjukkan perkembangan positif. Namun, fenomena penurunan laba pada tahun berjalan menarik perhatian peneliti untuk melakukan kajian lebih lanjut guna menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi perubahan tersebut. Selain itu, sebagaimana dilansir dari

badungkab.go.id (portal resmi Pemerintah Kabupaten Badung) pada tanggal 26 November 2024 dalam *Exit Meeting* Audit LPD Tahun 2024, Bupati Giri Prasta menegaskan bahwa audit ini merupakan kewajiban bagi seluruh LPD di Kabupaten Badung. Hasil audit memperlihatkan bahwa dari 122 LPD yang ada, terdapat sejumlah LPD dengan kinerja yang sangat baik, sementara beberapa lainnya masih perlu perbaikan, dan sebagian lainnya memerlukan perhatian lebih lanjut guna meningkatkan tata kelola dan keberlanjutan operasionalnya. Merujuk pada data yang didapat di Lembaga Pemberdayaan Lembaga Perkreditan Desa (LPLPD) Provinsi Bali pada tahun 2023, pada LPD se-Kabupaten Badung terdapat 26 LPD dalam kondisi kurang sehat dan 14 LPD dalam kondisi tidak sehat. Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah LPD kurang sehat menurun menjadi 22, sedangkan LPD tidak sehat berjumlah 12. Perubahan ini menunjukkan dinamika kesehatan LPD yang perlu mendapat perhatian dan evaluasi lebih lanjut. Sebab, tingkat kesehatan LPD ini disebabkan oleh adanya penurunan pendapatan yang dialami LPD (Asih & Atmadja, 2022).

LPD merupakan sarana pengelolaan aset desa yang wajib memerhatikan pentingnya laba dalam menjalankan operasional (Marlina, dkk., 2024). Sebab, tidak semua pengurus desa bisa menjaga kestabilan LPD. Dalam hal ini tentu ada kepentingan individu maupun kelompok yang menginginkan hasil dari adanya LPD. Jika kepentingan ini menyimpang dari pararem atau aturan LPD, maka tidak menutup kemungkinan LPD juga dapat mengalami kebangkrutan. Permasalahan ini sebaiknya harus cepat dan tepat untuk ditindaklanjuti agar mencegah konflik keagenan. Kepentingan juga mempunyai dampak buruk selain kebangkrutan, juga berdampak pada masyarakat yang menaruh tabungan dan deposito atau sudah percaya menaruh

aset yang dimiliki di LPD tersebut. Selain itu, jika pemerintah belum mengetahui ada penyimpangan yang terjadi pada pengurus desa yang menyebabkan kerugian pada LPD tetapi LPD tersebut masih mampu bertahan, maka jika didengar atau diketahui oleh masyarakat akan menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya pada LPD tersebut. Berbagai macam kerugian ini yang akan membuat net profit margin menjadi turun, sehingga pertumbuhan laba juga secara langsung akan menurun. Apabila LPD tidak mampu bertahan, maka akan terjadi kebangkrutan pada LPD. Hasil penelitian oleh (Handayani & Winarningsih, (2020), (Endri, dkk. (2020), Habibah, dkk. (2021), Desda, (2022), Hendra, et al. (2024) menjelaskan bahwa margin pendapatan bersih berpengaruh positif pada pertumbuhan laba. Namun, lain halnya dengan studi dari Syafitri, dkk. (2022) yang menyatakan margin pendapatan bersih berpengaruh negatif pada pertumbuhan laba. Adapun riset dari Rokayah & Triyonowati (2022) yang memperlihatkan bahwa margin pendapatan bersih tidak berefek pada pertumbuhan laba.

Selain memperhatikan margin pendapatan bersih, LPD juga harus menjaga penilaian modal LPD dengan baik. Sebab, isu konflik kepentingan antara pemilik dan pengelola berpotensi menghambat pencapaian yang akan dicapai dan mengurangi efektivitas dalam peningkatan kesejahteraan dari pemilik modal. Tata kelola yang baik dapat mengurangi konflik kepentingan dan dipercaya dapat meningkatkan kesejahteraan pemilik modal khususnya modal yang ada pada LPD (Handranata & Ruslim, 2022; Widayawati & Hardati, 2023). Penilaian modal LPD penting dilakukan untuk meminimalisir permasalahan keagenan yang bisa terjadi antara pengelola LPD dalam perannya sebagai agen dan pemilik, seperti tata krama desa, dan relasi antara

manajemen LPD dengan pihak kreditor, seperti BPD Bali, yang tidak hanya menuntut terpeliharanya hubungan yang harmonis. Peningkatan risiko gagal kredit selama masa pandemi berdampak pada penurunan ketersediaan modal minimum LPD, yang kemudian membatasi operasional penyaluran kredit guna menjaga kestabilan modal lembaga (Wiriya, dkk., 2022). Jika suatu LPD mampu mengukur aktiva yang dimiliki, maka LPD bisa mengatasi masalah kerugian. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dapat menganalisis melalui nilai *Capital Adequacy Ration* (CAR) Dalam perihal tersebut dapat ditunjukkan bahwa tingginya nilai CAR, maka hasil yang didapat akan lebih efektif untuk mengatasi permasalahan kredit macet. Di samping itu juga dapat diartikan dengan *Capital Adequacy Ratio*, LPD lebih mampu dalam menanganai reaksi negatif dari kerugian yang mungkin akan dihadapi dari resiko dan LPD bisa memperoleh laba, sehingga masyarakat akan lebih percaya pada LPD tersebut (Puspita & Mustanda 2019).

Maka dari itu, langkah strategis yang perlu diimplementasikan oleh LPD adalah meminimalisasi potensi permasalahan keagenan yang terjadi antara pihak manajemen selaku agen dan pemilik sebagai prinsipal, serta memastikan bahwa seluruh hak dan kepentingan para pemangku kepentingan terhadap peran dan orientasi kelembagaan LPD dapat terpenuhi secara optimal. Hasil penelitian oleh Siddique, dkk., (2021), Hasan, dkk., (2020), Febriyanti & Aini (2022), Dewi, dkk. (2024), dan Ngatinem & Fauzi (2024) yang menunjukkan penilaian modal mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada pertumbuhan keuntungan. Akan tetapi, hasil riset dari Mahmudah & Oswari (2020), (Dewi & Puspaningsih, (2020), serta Wulandari & Rofiuddin (2022) yang mendapatkan hasil penelitian penilaian modal berpengaruh negatif

signifikan pada pertumbuhan laba. Di samping itu, terdapat perbedaan dari penelitian yang telah disebutkan sebelumnya. Hasil penelitian oleh Sujana, dkk. (2018) dan Syafaat (2021) menyimpulkan bahwa penilaian modal tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan laba. Peningkatan modal ini bisa mempermudah LPD mengoperasikan LPD, sehingga akan mengalami peningkatan yang mengakibatkan pertumbuhan laba pada LPD mengalami kenaikan.

Adapun kebaharuan yang terdapat pada studi ini, yakni terletak pada variabel likuiditas yang menjadi variabel moderasi. Variabel likuiditas dipilih menjadi variabel pemoderasi karena likuiditas mempunyai peran yang signifikan dalam mendukung kelancaran kegiatan operasional LPD. Likuiditas mengindikasikan kapasitas LPD dalam melakukan kewajibannya dalam rentang jangka pendek seperti pembayaran pinjaman dan operasional sehari-hari, tanpa mengganggu kestabilan keuangan (Novita & Aminah, 2024). Pada operasional LPD, likuiditas sangat penting karena memungkinkan LPD untuk terus menjalankan fungsi-fungsinya secara efisien, seperti memberikan kredit kepada anggota, menerima simpanan, dan melakukan transaksi lainnya. Likuiditas yang cukup akan memastikan bahwa LPD dapat mempertahankan kelangsungan operasional dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut. Selain itu, likuiditas juga dapat mempengaruhi keputusan-keputusan strategis dalam pengelolaan dana dan investasi, yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja keuangan LPD. Adapun hasil penelitian oleh Dewi & Puspaningsih (2020), Armelia, dkk. (2024), dan Tanan (2020) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh positif pada pertumbuhan laba. Namun, Dewi & Kastiani (2023), Diyanti & Anwar (2021), Putri & Sitohang (2019), Widjaja, dkk. (2024) menyatakan bahwa likuiditas berpengaruh

negatif pada pertumbuhan laba. Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka penelitian ini mengangkat judul “Likuiditas Sebagai Pemoderasi Pengaruh Margin Pendapatan Bersih dan Penilaian Modal Pada Pertumbuhan Laba di LPD se-Kabupaten Badung”.

1.2 Motivasi Penelitian

Fenomena fluktuasi kinerja keuangan LPD di Kabupaten Badung memberikan sinyal penting bagi perlunya kajian yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor internal yang memengaruhi pertumbuhan laba. Studi ini memberikan *novelty* berupa pengujian peran likuiditas sebagai variabel moderasi, karena diduga mampu memperkuat pengaruh margin pendapatan bersih dan penilaian modal terhadap pertumbuhan laba. Motivasi penelitian ini ditunjukkan dari dinamika laba yang mengalami perubahan signifikan selama periode 2018 hingga 2024, dengan penurunan tajam pada masa pandemi dan pemulihan yang mulai tampak di tahun-tahun berikutnya. Studi ini menawarkan *novelty* berupa pengujian peran likuiditas sebagai variabel moderasi, yang diduga mampu memperkuat pengaruh margin pendapatan bersih dan penilaian modal terhadap pertumbuhan laba. Perbedaan tingkat kesehatan antar LPD, sebagaimana tercermin dalam laporan audit dan data LPLPD Provinsi Bali, menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut terhadap faktor internal yang memengaruhi stabilitas keuangan, khususnya dalam menjaga likuiditas guna mendukung pertumbuhan laba secara berkelanjutan.

1.3 Identifikasi Masalah

Masalah penelitian terkait LPD di Kabupaten Badung bisa dijabarkan dengan dua perspektif utama, yakni sisi praktis dan teoritis. Dari sudut pandang praktis, LPD di Provinsi Bali memiliki peran penting dalam pengelolaan kekayaan desa adat serta mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. LPD beroperasi sebagai lembaga finansial yang mengumpulkan dana dari masyarakat dan terwujud dalam bentuk tabungan dan investasi jangka panjang (deposito), serta menyalurkannya kembali dengan bentuk kredit guna memperoleh keuntungan. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, LPD di Kabupaten Badung menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada fluktuasi pertumbuhan laba.

Berdasarkan data laporan keuangan LPD Kabupaten Badung dari tahun 2019 hingga 2024, terlihat adanya ketidakkonsistenan dalam pertumbuhan laba. Pada tahun 2019, pertumbuhan laba masih menunjukkan angka positif sebesar 0,11%. Namun, pada tahun 2020 dan 2021, terjadi penurunan signifikan masing-masing sebesar -0,33% dan -5,88%, yang diduga akibat dampak pandemi Covid-19. Meskipun pada tahun 2022 dan 2023 pertumbuhan laba kembali positif, mencapai 0,12% dan 12,13%, kondisi kembali melemah pada tahun 2024 dengan penurunan sebesar 0,11%. Penurunan laba ini mengindikasikan adanya faktor-faktor yang memengaruhi kestabilan keuangan LPD, yang memerlukan analisis lebih lanjut.

Salah satu faktor utama yang dapat memengaruhi fluktuasi pertumbuhan laba adalah margin pendapatan bersih. Sejumlah studi terdahulu memperlihatkan temuan yang beragam mengenai dampak margin pendapatan bersih terhadap pertumbuhan laba, di mana beberapa studi menemukan pengaruh positif, sementara yang lain

menunjukkan pengaruh negatif atau tidak signifikan. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah margin pendapatan bersih secara langsung berkontribusi terhadap pertumbuhan laba LPD di Kabupaten Badung.

Selain itu, penilaian modal juga menjadi aspek krusial dalam keberlanjutan LPD. Berfungsi sebagai lembaga keuangan yang dikelola oleh desa adat, LPD harus memiliki manajemen modal yang baik untuk menjaga stabilitas operasionalnya. Namun, adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan modal LPD dapat berpotensi menimbulkan permasalahan keagenan yang berdampak pada menurunnya kinerja keuangan. Beberapa riset menyatakan penilaian modal dapat mempengaruhi secara positif pada pertumbuhan laba, sedangkan penelitian lain menunjukkan hasil yang bertentangan.

Selanjutnya, likuiditas menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam mendukung kelangsungan operasional LPD. Kemampuan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) melaksanakan kewajibannya yang berjangka pendek tanpa adanya hambatan finansial merupakan indikator kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Namun, penelitian sebelumnya memberikan hasil yang bervariasi terkait pengaruh likuiditas terhadap pertumbuhan laba, sehingga perlu diteliti lebih lanjut apakah likuiditas dapat memoderasi pengaruh margin pendapatan bersih dan penilaian modal terhadap pertumbuhan laba LPD di Kabupaten Badung.

Selain tantangan dalam aspek keuangan, pengawasan terhadap LPD di Bali masih tergolong belum optimal. Berdasarkan data yang diperoleh di LPLPD Provinsi Bali pada tahun 2023, pada LPD se-Kabupaten Badung terdapat 26 LPD dalam kondisi kurang sehat dan 14 LPD dalam kondisi tidak sehat. Sementara itu, pada tahun 2024

jumlah LPD kurang sehat menurun menjadi 22, sedangkan LPD tidak sehat berjumlah 12. Perubahan ini menunjukkan dinamika kesehatan LPD yang perlu mendapat perhatian dan evaluasi lebih lanjut. Meskipun jumlah LPD yang kurang sehat mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, kondisi ini tetap memerlukan perhatian lebih lanjut agar LPD dapat terus beroperasi secara berkelanjutan. Berdasarkan fenomena yang terjadi, studi ini memiliki tujuan yakni agar bisa mengeksplorasi pengaruh margin pendapatan bersih dan penilaian modal terhadap pertumbuhan laba, serta peran likuiditas sebagai variabel moderasi di LPD se-Kabupaten Badung. Dengan mengetahui determinan yang memengaruhi pertumbuhan laba, diharapkan dapat diperoleh rekomendasi yang dapat meningkatkan kinerja dan keberlanjutan LPD dalam mendukung perekonomian desa adat di Bali.

Dari sisi teoritis, penelitian ini berpotensi memberikan kontribusi pada pengembangan konsep pengelolaan keuangan berbasis komunitas adat. Berdasarkan teori agensi, konflik antara pengelola sebagai agen dan masyarakat adat sebagai prinsipal yang dikarenakan informasi yang didapat tidak setara, yang berefek pada pengambilan keputusan sering kali tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat. Sebagai alternatif, teori stewardship mengedepankan pendekatan di mana pengelola memprioritaskan kepentingan jangka panjang lembaga dan masyarakat adat. Dalam penelitian ini, variabel seperti margin pendapatan bersih, penilaian modal, dan likuiditas menjadi fokus utama untuk mengevaluasi kinerja keuangan LPD. Namun, hasil penelitian sebelumnya menunjukkan adanya perbedaan temuan mengenai pengaruh variabel-variabel ini terhadap pertumbuhan laba, sehingga memerlukan kajian lebih lanjut. Penelitian ini juga mengusulkan likuiditas sebagai variabel

moderasi untuk memahami lebih jauh bagaimana variabel-variabel tersebut memengaruhi kinerja keuangan LPD.

1.4 Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi pemasalahan, penulis membatasi permasalahan penelitian ini dan memfokuskan pengamatan pada Margin Pendapatan Bersih dan Penilaian Modal sebagai variabel independen pada Pertumbuhan Laba sebagai variabel dependen. Selain itu, penulis juga menambahkan variabel Likuiditas Sebagai variabel moderasi. Penelitian ini menggunakan LPD Kabupaten Badung yang telah diaudit pada tahun pengamatan 2019 sampai dengan 2024.

1.5 Rumusan Masalah

Merujuk pada penjabaran fenomena penelitian yang telah diuraikan, dibawah ini ialah rumusan masalahnya:

1. Apakah margin pendapatan bersih memberikan efek pada pertumbuhan laba di LPD se-Kabupaten Badung?
2. Apakah penilaian modal memberikan dampak pada pertumbuhan laba di LPD se-Kabupaten Badung?
3. Apakah likuiditas mampu memoderasi pengaruh margin pendapatan bersih pada pertumbuhan laba di LPD se-Kabupaten Badung?
4. Apakah likuiditas mampu memoderasi pengaruh penilaian modal pada pertumbuhan laba di LPD se-Kabupaten Badung.

1.6 Tujuan Penelitian

Dari penjabaran masalah yang diuraikan pada latar belakang, studi ini bertujuan dalam merumuskan suatu konseptual dan model empiris yang mana model ini dapat mengisi celah yang ada pada riset sebelumnya terkait determinan yang berpengaruh pada peningkatan pertumbuhan laba di LPD se-Kabupaten Badung. Dalam rangka menjawab *gap* dari risete sebelumnya, maka studi ini berupaya pada pengembangan dan pengujian model baru melalui analisis mendalam mengenai peran strategis variabel likuiditas sebagai pemoderasi pengaruh margin pendapatan bersih dan penilaian modal pada pertumbuhan laba di LPD se-Kabupaten Badung.

Dari penjabaran tujuan utama studi ini, maka bisa dijabarkan tujuan khususnya di bawah ini:

1. Agar dapat menganalisis secara empiris dampak margin pendapatan bersih pada pertumbuhan laba di LPD se-Kabupaten Badung.
2. Agar bisa mengeksplorasi pengaruh penilaian modal pada pertumbuhan laba di LPD se-Kabupaten Badung.
3. Untuk menguji likuiditas sebagai pemoderasi pengaruh margin pendapatan bersih pada pertumbuhan laba di LPD se-Kabupaten Badung.
4. Untuk menguji likuiditas sebagai pemoderasi pengaruh penilaian modal pada pertumbuhan laba di LPD se-Kabupaten Badung.

1.7 Kontribusi Penelitian

1.7.1 Kontribusi Teori

Peneliti berharap bisa berkontribusi secara keilmuan dari temuan studi yang sedang diteliti, yakni:

1. Studi ini bisa mewujudkan suatu konsep yang dikembangkan selaras dengan teori yang ada, yakni Lembaga Perkreditan Desa merujuk pada analisis pertumbuhan laba serta bisa memperkaya literatur ilmiah dengan mengidentifikasi dan menganalisis determinan yang berkontribusi pada pertumbuhan laba di LPD se-Kabupaten Badung. Studi ini bisa menjadi literatur tambahan terhadap riset terdahulu dengan menganalisis korelasi antara likuiditas, margin pendapatan bersih, penilaian modal, dan pertumbuhan laba, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai referensi tambahan.
2. Temuan dari studi ini sudah selaras dengan Teori Keagenan bahwa dengan adanya LPD bisa memberikan pengaruh dan dipengaruhi oleh pihak-pihak pemangku kepentingan. Peningkatan pertumbuhan laba dapat mengarahkan LPD untuk memperhatikan margin pendapatan bersih, penilaian modal, dan likuiditas. Sebab LPD memerlukan dukungan dari desa adat tersebut sehingga hak desa pakraman perlu menjadi sorotan dan LPD harus mengurangi kerugian untuk desa pakraman.
3. Studi ini menjabarkan peran likuiditas dalam membantu LPD dalam mengalokasikan dana sesuai dengan aturan adat Desa, sehingga meminimalisir kerugian akibat pemberian pinjaman kepada masyarakat

desa. Sebab likuiditas mempunyai peranan penting dalam aktivitas operasional LPD serta dapat mempertahankan LPD dari perilaku pengurus yang menyimpang. Jika dana yang dimiliki LPD stabil, maka akan memberikan dampak positif pada pertumbuhan laba.

1.7.2 Kontribusi Praktik

Hasil dari studi ini bisa mempunyai dampak praktik, yakni temuan ini bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk pengurus LPD dan Desa Adat dalam pengambilan keputusan mengenai pentingnya likuiditas sebagai pemoderasi pengaruh margin pendapatan bersih dan penilaian modal pada pertumbuhan laba di LPD se-Kabupaten Badung. Upaya untuk memperhatikan margin pendapatan bersih, penilaian modal, serta likuiditas, dan peningkatan pertumbuhan laba pada jangka pendek dan jangka panjang. Maka, margin pendapatan bersih, penilaian modal, serta likuiditas bagi pengurus LPD dan pihak Desa Adat tetap harus diperhatikan.

Temuan dari studi ini bisa berkontribusi pada pemahaman pengurus LPD dan pihak Desa Adat terkait determinan yang berkontribusi pada kenaikan pertumbuhan laba LPD, yang mana pertumbuhan laba tersebut ialah kemampuan LPD yang sudah mampu mengelola LPD dengan baik. Hal ini selaras dengan teori keagenan yang menunjukkan bahwa jika antara pengurus LPD dengan pihak Desa Adat bisa memberikan informasi yang sama kepada masyarakat artinya tidak ada kepentingan pribadi atau perilaku yang menyimpang dari pengurus LPD. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang dapat meningkatkan

pertumbuhan laba, akan membantu pengurus LPD untuk mengambil keputusan ketika masyarakat akan meminjam dana di LPD, sehingga tidak mengganggu keberlanjutan LPD.

1.7.3 Kontribusi Kebijakan

Temuan studi ini bisa membagikan saran untuk pengurus LPD dan pihak Desa Adat serta masyarakat yang memanfaatkan keberadaan LPD di desa tersebut. Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan laba, juga harus memperhatikan kebijakan dari aturan LPD dan aturan dari Pemerintah Provinsi Bali. Kebijakan ini tentu sudah sesuai dengan pendapatan yang diterima serta beban yang dikeluarkan oleh LPD. Kemudian penilaian modal juga sudah mengacu pada aturan LPD, serta implementasi dari likuiditas telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku.

1.8 Penjelasan Istilah

Dalam penyusunan tesis ini, terdapat sejumlah terminologi dan akronim yang digunakan secara konsisten, yang penjelasannya disajikan sebagai berikut untuk memastikan kejelasan dan keseragaman pemahaman bagi pembaca.

- 1) LPD : Lembaga Perkreditan Desa
- 2) BPS : Badan Pusat Statistik
- 3) PLPDP : Pembina Lembaga Perkreditan Desa Provinsi
- 4) PLPDK: Pembina Lembaga Perkreditan Desa Kabupaten/Kota
- 5) BPD : Bank Pembangunan Daerah
- 6) NPM : *Net Profit Margin*
- 7) CAR : *Capital Adequacy Ratio*

8) MS : Modal Sendiri

9) ATMR : Aktiva Tertimbang Menurut Resiko

10) CR : *Current Rasio*

1.9 Rencana Publikasi

Rencana diseminasi temuan studi ini diarahkan pada publikasi di Jurnal Ilmiah Akuntansi (JIA) yang terindeks SINTA 3, sebagai bagian dari upaya kontribusi ilmiah dalam bidang akuntansi.

